

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENYAKIT MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG.

Ibnu Hajar¹, Lis Febrianda¹, Darmini Roza²
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta
e-mail: ibnuhajar@gmail.com.

ABSTRAK

Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tindak tanduk seorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan tata karma kesopanan agama, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari penyakit masyarakat maka dibentuklah Perda Nomor 11 Tahun 2005. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menangani penyakit masyarakat? (2) Apakah kendala dihadapi? (3) Bagaimanah upaya-upaya yang dilaksanakan? Metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Teknik analisis data kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Peran pemerintah daerah dalam menangani penyakit masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang belum terlaksana dengan baik 2) Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani penyakit masyarakat di Kota Padang adalah faktor internal dan eksternal. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani penyakit masyarakat adalah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2005.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penyakit Masyarakat, Kota Padang.

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN HANDLING COMMUNITY DISEASES BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2005 CONCERNING GENERAL DUTY AND COMMUNITY CONDITION IN PADANG CITY.

Ibnu Hajar¹, Lis Febrianda¹, Darmini Roza²
Program Master of Law, Bung Hatta University Graduate Program
e-mail: ibnuhajar@gmail.com

ABSTRACT

Community sickness is an act / action of a person or group of people that occurs in the midst of society that is not in accordance with the religious, customary, and statutory rules and regulations. In order to create public order and peace in the community from community diseases, Perda No.11 of 2005 was formed. Issues raised in this study are: (1) What is the role of local government in community disease situations? (2) What are the obstacles? (3) What efforts has been carried out? This study used a socio-legal approach. Data used in this thesis include primary and secondary data. Data collected through document studies and in-depth interviews, analyzed qualitatively descriptive. The results of the research: (1) The role of the local government in dealing with community diseases based on Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Public Peace in the City of Padang has not been implemented properly (2) The obstacles faced by the local government in dealing with community diseases in Padang City are internal and external factors (3) The efforts made by the local government in dealing with community diseases are to carry out counseling and socialization of Perda No.11 of 2005.

Keywords : Role of Government, Community Disease, Padang city.